

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sejatinya mampu menjadikan terdidik sebagai manusia seutuhnya. Pendidikan menjadi senjata yang sangat mematikan. Pendidikan bisa membantu manusia mengubah dunia. Pendidikan dapat membebaskan terdidik dari segala bentuk ketertindasan. Pendidikan tidak boleh melahirkan kaum yang saling berkuasa karena itu akan memicu terjadinya penindasan dalam pendidikan. Pendidikan yang membebaskan sejatinya menjadi pendidikan yang mampu mengeluarkan fitrah manusia dari kekangan dan intimidasi. Pendidikan yang membebaskan akan melahirkan masyarakat yang demokratis, sehingga bebas mengutarakan pendapat dan bebas menuntut hak-hak asasinya. Sianipar menjelaskan bahwa pendidikan seharusnya memberikan kebebasan dan melepaskan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan dari ketidaktahuan, kepincangan, kemelaratan, dan penjajahan.¹ Oleh karena itu, pendidikan menjadi hal yang sangat vital bagi kemajuan suatu negara. Jika dalam suatu negara terdapat pendidikan yang berkualitas, maka akan memberikan pengaruh yang besar dari segi kualitasnya pula, sehingga untuk memajukan suatu bangsa dan generasinya, peningkatan mutu pendidikan harus ditingkatkan.² Pendidikan memproduksi kemampuan belajar siswa dan memberi perubahan bagi masa depan setiap siswa yang ambil bagian dalam kegiatan belajar mengajar.³ Anak didik selayaknya dapat memandang guru dan teman itu sebagai subjek pendidikan, yang mana antar subjek pendidikan saling memecahkan dan saling melakukan

¹ Desi Sianipar, "Pendidikan Agama Kristen Yang Membebaskan," *Jurnal Shanan* 1, no. 1 (2017): 136–157, <http://ejournal.uki.ac.id/Index.Php/Shan/Article/View/1481>.

² Sri Wulan Anggraeni, Yayan Alpian & Nizmah Maratos Soleha Unika Wiharti, "Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia," *Jurnal Buana Pengabdian* Vol. 1, no. 1 (February 2019): 66–72, accessed April 12, 2022, <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JurnalBuanaPengabdian/article/view/581/537>.

³ A Dan Kia, "Kajian Pedagogis Tentang Tanggung Jawab Guru Pak Secara Profesional Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik," *Jurnal Shanan* 3, no. 2 (October 28, 2019): 77–94, accessed April 12, 2022, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/shan/article/view/1580>.

pendidikan. Dengan demikian, pendidikan mendeskripsikan orientasi dalam diri setiap orang. Orientasi pendidikan diperlihatkan dengan taraf hidup yang baik serta meningkatnya perubahan karakter seperti peningkatan kognitif, afektif dan psikomotor, serta kegiatan untuk mentransendensikan dirinya secara bermartabat.

Penjelasan di atas sejalan dengan pemikiran Paulo Freire yang menentang sistem pendidikan di Brasil. Paulo Freire sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya. Karena pengalaman pribadi tersebut, Freire mengenali masa lalu Brasil yang sangat otoriter dan berputar di sekitar kekuatan berlebihan dari penjajahan. Masyarakat Brasil tidak merasakan pendidikan yang baik, kehidupan yang tidak layak dan kebebasan dalam menentukan hak asasinya terkekang. Masyarakat Brasil tertindas dari segi struktur sosial, budaya, gender dan terasing dari hubungan dengan dunia luar, sehingga mereka hidup dalam budaya diam yang menyebabkan mereka buta huruf, apatis, tertindas dan fatalis.⁴ Pendidikan digunakan sebagai kendaraan untuk menjalankan ideologi yang pada akhirnya menjerumuskan masyarakat Brasil ke dalam jurang kemiskinan, penindasan, kebodohan, perbudakan dan terasing dari dunia luar. Masyarakat Brasil dieksploitasi untuk memberikan keuntungan bagi para pemangku kekuasaan dan koloninya. Marx mengamati bahwa kelas pekerja tidak memiliki negara. Negara adalah untuk modal bukan orang. Demokrasi hanyalah slogan. Esensi demokrasi dijual kepada penawar tertinggi dan generasi kelas pekerja didorong ke dalam perbudakan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, negara-negara berkembang seperti Brasil menjadi sumber utama eksploitasi dan penindasan korporasi.⁵ Salah satu mekanisme untuk membuat ideologi kapitalis mengontrol kesadaran manusia adalah dengan menjadikannya bagian dari kurikulum budaya. Sistem ini sangat berhasil menekan peluang kritik struktural, terutama pada berbagai jenjang

⁴ Sianipar, "Pendidikan Agama Kristen Yang Membebaskan."

⁵ John Dale · Emery J. Hyslop-Margison, *Paulo Freire: Teaching for Freedom and Transformation* (New York: Springer, 2010), 17.

pendidikan. Penindasan ini bahkan dapat dicapai dengan menimbulkan ketakutan dan keputusan diantara para populasi yang pada gilirannya melihat pendidikan sebagai kendaraan untuk pekerjaan daripada sebagai kekuatan untuk transformasi sosial.⁶

Problematika yang terjadi di Brasil, mengarahkan Freire ke sekolah-sekolah demokratis. Dimana para pendidik berjuang untuk mengubah iklim pendidikan Brasil yang tradisional dan otoriter.⁷ Paulo Freire menawarkan pendidikan pembebasan dengan cara merevisi pendidikan gaya bank dengan model pendidikan yang dialogis aksi-refleksi.⁸ Freire menggunakan teori kesadaran kritis dan metode dialog untuk menyadarkan masyarakat Brasil agar kritis sesuai dengan situasi yang terjadi.⁹ Kesadaran kritis merujuk pada perubahan bentuk transformasi sosial yang hanya bisa terjadi melalui refleksi/pengakuan dan tindakan kaum tertindas untuk membebaskan diri dari kondisi yang menindas.¹⁰ Untuk mencapai tujuan penyadaran kritis, maka Freire mengajukan program pendidikan mengenai konsep antropologi kebudayaan. Di antaranya, pembedaan dunia natural dan dunia kultural, peranan aktif manusia dengan realitasnya, kebudayaan sebagai hasil kerja manusia (hasil kegiatan yang terus menerus berkelanjutan dengan mencipta dan mencipta kembali), makna transendental dari hubungan manusiawi, dimensi manusiawi dari kebudayaan; kebudayaan sebagai pencapaian sistematis dalam pengalaman manusia (tidak hanya sebagai tindakan menyimpan informasi, melainkan sebagai tindakan kreatif), demokratisasi kebudayaan, membaca dan menulis sebagai kunci untuk memasuki ruang komunikasi tertulis. Hal ini dimaksudkan bahwa manusia sebagai subjek aktif perubahan dengan mencipta dan terus mencipta kembali serta hadir dalam sejarah

⁶ Ibid., 26.

⁷ Asoke Bhattacharya, *Paulo Freire Rousseau of the Twentieth Century* (Rotterdam: Sense Publishers, 2011), 111.

⁸ Juanda Manullang, Renny Maria & Agustinus Manullang “Relevansi Pendidikan Humanis Paulo Freire Dengan Pendidikan Agama Kristen Jenjang Sekolah Menengah Atas,” *Jurnal Educatio* Vol. 7, no. 2 (June 13, 2021): 482–490, accessed April 12, 2022, <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/educatio/article/view/1088/721>.

⁹ Sianipar, “Pendidikan Agama Kristen Yang Membebaskan.”

¹⁰ John Dale · Emery J. Hyslop-Margison, *Paulo Freire: Teaching for Freedom and Transformation* (New York: Springer, 2010), 111.

yang terus berlanjut. Oleh karena itu, Freire memahami bahwa dalam lingkungan belajar yang demokratis, memiliki potensi untuk menciptakan perubahan dalam struktur sosial dengan membantu siswa memahami konstruksi politik dan peran agensi manusia dalam menghasilkan perubahan sosial.¹¹ Freire juga berpendapat bahwa ide-idenya selalu membutuhkan penemuan kembali dan penyesuaian tergantung pada konteks penerapannya. Dia menyadari bahwa pendidikan adalah kontekstual dan setiap konteks memiliki kebutuhan yang sesuai dengan situasi lapangan, sehingga tidak ada metode instruksi tunggal atau praktik terbaik yang ada.¹² Bagi Freire, pendidikan pembebasan menjadi proses bagi manusia untuk mengkonstruksi makna penting hidupnya, agar terbebas dari berbagai hal yang mengekang kebebasan hidup manusia.

Konteks pendidikan agama Kristen yang membebaskan menjadi isu utama dalam situasi yang terjadi di Brasil. Hadirnya pendidikan agama Kristen yang membebaskan tidak terlepas dari upaya para teolog Amerika latin untuk memperbaharui kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dari tindakan eksploratif pemerintah dan perusahaan internasional. Inti persoalannya adalah mengkritisi perbudakan yang dilakukan oleh kaum oligarki, kapitalis dan kekerasan yang membuat rakyat menderita.¹³ Teologi pembebasan merupakan respons yang kuat terhadap kemiskinan melalui aktivisme politik para imam Katolik yang mewakili gereja yang sangat berpengaruh dan aktif dalam budaya Amerika Latin.¹⁴ Di sisi lain, Paulo Freire juga hadir dengan pedagogi kritis. Dalam pedagogi kritis yang dikembangkan oleh Freire, tatanan sosial tidak disajikan sebagai konsekuensi dari sejarah atau sifat manusia, melainkan sebagai konstruksi artifisial untuk melindungi kepentingan ideologis yang kuat. Praktik pedagogis kritis menempatkan kebutuhan pembelajar di atas agenda kepentingan politik

¹¹ Ibid., 31.

¹² Ibid., 3.

¹³ Sianipar, "Pendidikan Agama Kristen Yang Membebaskan: Suatu Kajian Historis PAK Di Indonesia."

¹⁴ Hyslop-Margison, *Paulo Freire: Teaching for Freedom and Transformation.*, 46.

perusahaan, dan mendorong rekonstruksi sosial untuk mencapai keadilan sosial.¹⁵ Freire menjelaskan bahwa proses yang diperlukan dari keingintahuan yang tulus hingga kritis harus disertai dengan pembentukan etika yang ketat bersama dengan apresiasi estetika. Lebih lanjut Freire menjelaskan bahwa praksis pendidikan, sambil menghindari jebakan moralisme puritan, tidak dapat menghindari tugas menjadi saksi kesusilaan/kemurnian sebagai laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konteks hubungan sosio-historis. Dengan demikian, manusia mampu membandingkan, mengevaluasi, mengintervensi, memutuskan dan mengambil arah baru, serta membentuk manusia sebagai makhluk etis.¹⁶ Oleh karena itu, nilai-nilai dan praktik tradisi Eropa tidak lagi dianggap lebih unggul dari tradisi lain atau dipaksakan pada orang lain. Tradisi dan praktik Eropa dikombinasikan dengan rasa hormat terhadap kebijaksanaan yang tertanam dalam semua budaya. Sementara ilmu alam memiliki satu metode penting dalam penyelidikan ilmiah, ada juga institusi moral, agama, dan estetika yang mengandung kebenaran penting yang harus diberi peran sentral dalam pengembangan pandangan dunia hingga kebijakan publik.¹⁷ Freire dan yang lainnya berada dalam kendali langsung gereja, terus mempromosikan aktivisme politik di antara penduduk yang mayoritas Katolik. Teologi pembebasan akhirnya menjadi roda penggerak utama dalam mesin Freire untuk melawan dominasi korporasi dan ketidakadilan sosial di Amerika Latin.¹⁸

Uraian di atas relevan dengan situasi yang terjadi di Indonesia, khususnya tentang afiliasi kapitalisme dengan feodalisme yang begitu melekat dengan budaya. Praktik budaya yang seharusnya dijadikan sebagai penopang manusia untuk mendeskripsikan identitas diri dan status sosial di tengah masyarakat yang majemuk untuk mengekspresikan diri justru menunjukkan ciri-ciri feodalisme dalam sistem nilai, norma, adat istiadat dan kebiasaan.

¹⁵ Ibid., 130.

¹⁶ Paulo Freire, *Pedagogy Of Freedom Ethics, Democracy and Civic Courage*, n.d., 18.

¹⁷ Hyslop-Margison, *Paulo Freire: Teaching for Freedom and Transformation.*, 133.

¹⁸ Ibid., 47.

Menurut KBBI, feodalisme merupakan sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan; sistem sosial yang mengagung-agungkan jabatan atau pangkat dan bukan mengagung-agungkan prestasi kerja; sistem sosial di Eropa pada abad pertengahan yang ditandai oleh kekuasaan yang besar di tangan tuan tanah.¹⁹ Hal ini tentu merugikan dan menyimpang dari nilai-nilai moral suatu daerah atau bangsa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan praktik-praktik yang terjadi dalam sistem sosial-politik sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Bukti lain yang bisa dijadikan acuan adalah sistem sewa tanah era kerajaan Romawi dan kerajaan-kerajaan di Eropa yang membagi struktur dan stratifikasi untuk memperkaya kaum bangsawan dan merugikan kaum jelata. Di sisi lain, sistem pendelegasian kekuasaan juga berdasarkan sosio-politik yang mengesampingkan sikap toleransi, sikap kemanusiaan dan sikap egaliter. Rudiaji Mulya menjelaskan kekuasaan dalam pemerintahan pada umumnya hanya digunakan untuk kemakmuran, kemewahan, kepuasan, keagungan dan kejayaan diri beserta kelompok dan keluarganya, bukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh ataupun untuk kebesaran bangsa dan negara.²⁰ Mengacu pada uraian tersebut, maka secara eksplisit feodalisme mengandung nilai yang negatif dan merugikan bagi semua pihak. Sebab, feodalisme memiliki ciri-ciri seperti: (a) kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri dan kelompok, (b) menggunakan rakyat dan negara sebagai alat untuk mencapai tujuan, (c) sistem kerjanya mengikat dan monopoli, (d) memberi sewa pada rakyat dengan sistem setengah budak, (e) sistem pendelegasian kekuasaan berdasarkan sosio-politik.²¹ Nilai-nilai melekat pada sebagian masyarakat, sehingga menciptakan kelas sosial dalam kehidupan masyarakat yang feodal.

¹⁹ KBBI, *arti feodalisme*, (Jakarta 2021)

²⁰ Rudiaji Mulya, *Feodalisme & Imperialisme Di Era Global* (Elex Media Komputindo, 2012), 21.

²¹ *Ibid.*, 5.

Masyarakat feodal merujuk pada masyarakat yang berorientasi dengan nilai pelayanan yang berlebihan terhadap penguasa, pejabat, birokrat, atau orang yang dituakan. Feodalisme muncul secara bertahap dan didirikan sebagai hasil dari perubahan besar-besaran di semua tingkatan ekonomi, politik, dan sosial. Kelas bangsawan berkisar dari raja hingga pejabat dan para sarjana. Kaum bangsawan begitu istimewa dalam menikmati layanan dan kontribusi dari rakyat jelata. Di antara kelas yang kurang istimewa dari sarjana-umum, petani, pengrajin dan pengusaha, petani memikul beban terberat dalam memenuhi kewajiban mereka. Petani bertani di tanah pemilikannya dan menyumbangkan makanan di setiap musim. Petani harus siap ketika majikan meminta mereka untuk memberikan layanan tenaga kerja atau militer. Sebagai imbalan, pemiliknya memberi sebidang tanah untuk ditinggali yang nantinya akan membantu petani dengan kebutuhan dasar. Apa yang diperoleh, tidak pernah lebih dari sebidang tanah dan kebutuhan dari pemiliknya.²² Di sisi lain, feodalisme mengalami pergeseran yang signifikan mengikuti arus waktu. Feodalisme secara cepat merambat ke semua sistem kehidupan masyarakat, seperti sistem penggunaan teknologi, sistem adaptasi manusia, sistem hukum, sistem militer, sistem norma yang berlaku, sistem budaya lokal serta sistem lainnya. Oleh karena itu, feodalisme perlu dipahami dari perspektif yang komprehensif dan lebih mendetail serta perspektif yang antipati. Sebab, feodalisme sifatnya kompleks, canggih dan tidak kelihatan tetapi terasa dalam praktiknya.

Dalam konteks budaya lokal, seperti budaya yang diwarisi dari nenek moyang juga mengalami pergeseran. Pergeseran budaya lokal ditandai dengan hadirnya budaya baru dan meleburnya nilai-nilai modernisasi dengan nilai-nilai budaya lokal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi budaya lokal yaitu perkembangan teknologi informasi yang masif, akulturasi budaya asing dengan budaya lokal, transmigrasi yang masif, dan perubahan global

²² Tung-tsu Chu, *The History of Chinese Feudal Society* (New York: Routledge, 2021), 89.

yang begitu cepat serta sistem kekerabatan masyarakat yang menuntut adanya penyesuaian dengan situasi dan kondisi lingkungan. Sedyawati menjelaskan bahwa perubahan kebudayaan dalam masyarakat tradisional terjadi karena adanya tarikan budaya asing atau nilai-nilai baru yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.²³ Lebih lanjut budaya baru memberi implikasi bagi budaya lokal yang ada di Indonesia, baik itu nilai, sikap dan perilaku masyarakat. Tidak terkecuali budaya Suku Boti di desa Boti, kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Suku Boti merupakan salah satu suku warisan kerajaan Timor (Atoin Meto) yang masih tersisa dan merupakan suku tertua di tanah timor.²⁴ Suku Boti terbagi dalam dua bagian yaitu Boti Dalam dan Boti Luar. Suku Boti Dalam, dikenal dengan keteguhannya dalam memegang tradisi yang dianut secara turun-temurun, dan tertutup dengan segala perubahan di sekitarnya. Sedangkan Boti Luar umumnya telah terbuka dengan perkembangan global, sehingga bebas untuk memeluk agama seperti Kristen Protestan maupun Katolik. Di sisi lain, Desa Boti mempunyai luas 17.16 Km² dengan jumlah penduduk 597 Kepala keluarga atau 2150 jiwa. Suku Boti Dalam terdapat 76 kepala keluarga yang secara langsung dibawah aturan Raja Boti, yakni di lingkungan khusus yang dekat dengan alamat hunian raja, sedangkan sisanya mengikuti aturan-aturan umum yang dipimpin oleh Kepala Desa Boti. Untuk Boti Dalam, sangat dekat dengan alam di mana mereka sangat menjaga kelestarian alam. Filosofinya adalah bahwa mereka akan selamat dan sejahtera sejauh mereka dapat menjaga alam dengan baik. Bagi mereka alam adalah pemberi hidup. Oleh karena itu, menjaga alam seperti tidak sembarang menebang pohon adalah harga yang tidak bisa ditawar-menawar oleh apapun.²⁵

²³ Babul Bahrudin dkk, "Pergeseran Budaya Lokal Remaja Suku Tengger Di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang," *Journal of Educational Social Studies* Volume 4 (June 2017): 20–28, accessed October 9, 2021, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess/article/view/16251/8498>.

²⁴ Aksilas Dasfordate & Paulo Rano, "Mata Rumah Dalam Adat Istiadat Suku Maumere Di Desa Hewokloang Kabupaten Sikka," *Nyiur: Jurnal Humaniora dan Ilmu Sosial* Volume 1, Nomor 1 (June 2020): 26–39, accessed October 9, 2021, <https://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/nyiur/article/view/242/158>.

²⁵ Petrus Ana Andung, "Komunikasi Ritual Natoni Masyarakat Adat Boti Dalam Di Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 1 (2014): 36–44.

Meski demikian, keduanya hanya dibatasi oleh pagar yang terbuat dari kayu. Keduanya juga hidup dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan kata lain, keduanya memiliki kebiasaan yang sama, namun berbeda dari segi pendidikan dan pemahaman tentang Tuhan.

Budaya Suku Boti umumnya memiliki nilai-nilai luhur yang positif seperti: (a) Nilai tentang prinsip manusia dengan Tuhan,²⁶ (b) bekerja keras,^{27,28} (c) mencintai dan merawat alam,²⁹ (d) mencintai dan merawat tradisi,^{30,31} (e) mencintai keluarga, (f) menjunjung tinggi etika,³² (g) menjaga hubungan sesama manusia.³³ Di samping nilai-nilai positif di atas, terdapat juga nilai-nilai negatif yang terkandung dalam budaya Suku Boti seperti: (a) Nilai-nilai adat yang terlalu mengikat masyarakat, (b) raja menjadi sumber hukum adat dan kepatuhan kepada raja adalah penyerahan mutlak, (c) kekuatan politik dan hukum hanya dikelola oleh tua-tua adat, (d) tidak semua anak diijinkan untuk bersekolah, (e) tidak menerima bantuan apapun dari luar, (f) tidak melebur dalam sistem modernisasi, (g) Nilai-nilai adat mengikat masyarakat/tidak memberi kebebasan untuk berubah, dan (h) Masyarakat Boti kurang berkembang/cukup puas dengan keadaan.³⁴ Nilai-nilai negatif tersebut menghambat lajunya perkembangan kehidupan masyarakat.

²⁶ Petrus Ana Andung & Hotlif Arkilaus Nope, "Media Rakyat Sebagai Media Komunikasi Pembangunan Masyarakat Suku Boti," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 14, no. 2 (December 6, 2017): 277–292, accessed April 12, 2022, <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/870>.

²⁷ Erna Suminar, "Persepsi Suku Boti Terhadap Lingkungan Hidup," *jurnal universitas kebangsaan* Volume 1, nomor 2 (September 2018): 89–94, accessed October 9, 2021, <http://jurnal.universitaskebangsaan.ac.id/index.php/ensains/article/download/100/91>.

²⁸ Andam SURIANTY ARDAN, "Pengembangan Perangkat Pembelajaran Biologi Berbasis Kearifan Lokal Timor Untuk Meningkatkan Pengetahuan Lingkungan Pada Topik Keanekaragaman Hayati Kelas X Sma," *Media Sains: Jurnal Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam* Volume 19, nomor 1 (June 2019): 33–39, accessed October 9, 2021, <http://jurnal.fkipundana.id/5>. Andam SURIANTY ARDAN.pdf.

²⁹ Erna Suminar, "Persepsi Suku Boti Terhadap Lingkungan Hidup."

³⁰ Petrus Ana Andung & Hotlif Arkilaus Nope, "Media Rakyat Sebagai Media Komunikasi Pembangunan Masyarakat Suku Boti."

³¹ Erna Suminar, "Persepsi Suku Boti Terhadap Lingkungan Hidup."

³² Dominikus Rato dkk, *Ekspresi Kebudayaan Dan Keadilan Dalam Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan*. (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2020), 481.

³³ Petrus Ana Andung & Hotlif Arkilaus Nope, "Media Rakyat Sebagai Media Komunikasi Pembangunan Masyarakat Suku Boti."

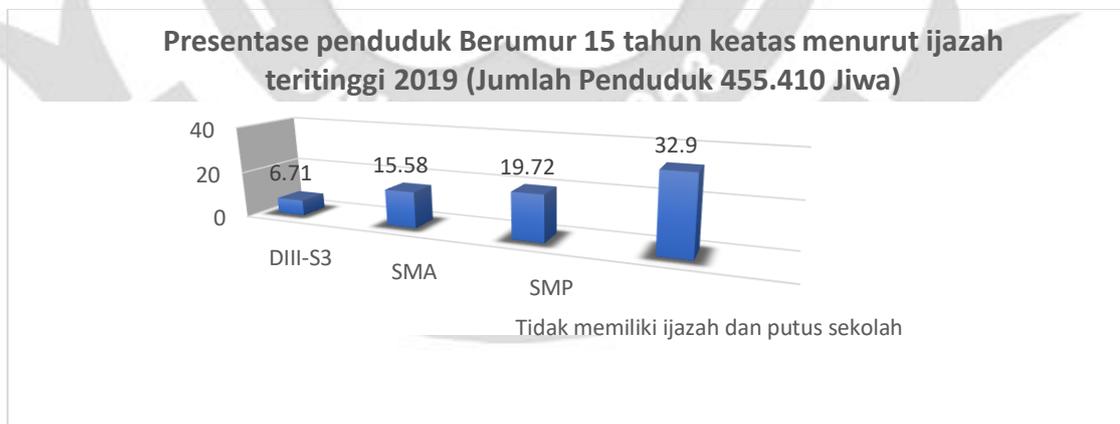
³⁴ Hasil wawancara informal dengan beberapa narasumber yang layak dipercaya di Soe, Timor Tengah Selatan, tanggal 16 Mei 2021, dengan menggunakan aplikasi telepon seluler.

Dalam perspektif humaniora, Suku Boti memiliki keunggulan seperti nilai-nilai positif yang sudah dipaparkan sebelumnya, namun ekonomi dan pendidikan menjadi persoalan yang memprihatinkan. Dengan kata lain, masyarakat kurang memperhatikan apa yang harus dilakukan untuk meng-upgrade diri dalam gerakan modernisasi yang semakin gencar terjadi. Di sisi lain, anak-anak yang kurang merasakan pendidikan serta fasilitas yang memadai menjadi problem tersendiri bagi perkembangan pikiran serta perkembangan masa depan anak itu sendiri. Dari sisi, pendidikan nonformal seperti pendidikan tentang etika, tentang kehidupan sosial, tentang moral dan tentang bagaimana menghargai orang menjadi pendidikan yang sudah wajib didapatkan. Namun, dari sisi pendidikan formal atau pendidikan yang diadakan oleh pemerintah sangat kurang dan bahkan tidak pernah sama sekali, sehingga efeknya adalah anak-anak kurang mengetahui tentang sistem ilmu yang terus berkembang dan mudah untuk dipengaruhi oleh hal-hal yang kurang baik dari pihak-pihak yang lebih berpendidikan. Dengan demikian, anak-anak yang seharusnya memiliki masa depan untuk bekerja dalam berbagai bidang pemerintahan atau bidang-bidang yang lebih menjanjikan kehidupan yang lebih baik menjadi terhambat. Secara praktis, budaya seharusnya bisa menjadi jembatan untuk memajukan masyarakat dari berbagai aspek seperti pendidikan dan ekonomi, namun yang terjadi adalah kebalikannya. Hal tersebut menjadi satu budaya yang melekat dalam diri sebagian besar masyarakat Suku Boti. Nilai-nilai negatif yang melekat pada Suku Boti menyebabkan ketimpangan dari berbagai aspek seperti pendidikan, status sosial, psikologis dan sebagainya.

Akibat dari problematika yang terjadi di dalam konteks masyarakat suku Boti, maka orang melakukan penelitian tentang suku Boti. Erna Suminar menjelaskan bahwa raja adalah sumber hukum adat dan kepatuhan kepada raja adalah penyerahan mutlak. Karenanya, persepsi masyarakat Boti terhadap ekologi bersumber pada keyakinan-keyakinan mistis yang dipandu

oleh raja.³⁵ Selanjutnya Sandiningtyas menjelaskan bahwa setiap anak di desa Boti boleh sekolah dengan catatan keluarga yang memiliki anak lebih dari satu dan jika hanya satu, maka tidak diijinkan demi menjaga tradisi/adat. Hal tersebut dilakukan dengan alasan menghargai pemerintah daerah dan negara.³⁶

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan 2019, tingkat pendidikan masih sangat rendah. Dari jumlah keseluruhan penduduk Timor Tengah Selatan, hanya 6,71% yang menyelesaikan studi di perguruan tinggi (DIII-S3), sedangkan yang menyelesaikan sekolah tingkat SMA 15,58%, tingkat SMP 19,72%, tingkat SD 25,08% dan yang lebih memilukan adalah 32,90% tidak memiliki ijazah dan putus sekolah.³⁷ Dari data BPS tersebut, Suku Boti Dalam masuk dalam kategori tidak memiliki ijazah dan jika memiliki (Boti Luar), tidak diijinkan tinggal di desa Boti dengan alasan telah melanggar sistem kekerabatan yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Presentase tingkat pendidikan dapat dilihat dalam diagram batang berikut:



³⁵ Erna Suminar, "Persepsi Suku Boti Terhadap Lingkungan Hidup."

³⁶ Herawati Sandiningtyas & Bambang Budi Wiyono, "Pendidikan Berbasis Budaya Lokal Suku Boti: Studi Kasus Di SDN-SMPN Satu Atap Oefau Desa Boti Nusa Tenggara Timur," *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan* 3, no. 1 (June 22, 2018): 77–82, accessed October 9, 2021, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jktpk/article/view/4435>.

³⁷ Badan Pusat Statistik (Penyunting), *Presentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah Teritinggi* (Soe, 2019).

Dalam pelaksanaan pendidikan agama Kristen, perilaku feodalis dari sistem budaya suku Boti sedikit memperkeruh citra masyarakat desa Boti yang secara khusus yang terkenal dengan etika dan normanya. Walaupun secara umum diterima oleh sebagian besar masyarakat desa Boti, namun hal ini tentu menghambat kebebasan masyarakat dalam berekspresi lewat berbagai aspek seperti pendidikan dan gaya hidup. Pernyataan tersebut, tentu punya dalil sebagai bagian dari kritik, bahwasanya setiap orang berhak hidup sesuai dengan standar yang di inginkan. Dalam hal ini, membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa dalam struktur hidup manusia. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika tersebut adalah melalui pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen harus dipahami dalam perspektif memperbaiki hidup manusia menjadi lebih baik dan agama dipandang sebagai kekuatan religius dalam menjalani kehidupan serta budaya dipandang sebagai satu kebiasaan yang memperkaya manusia dalam keberagaman di tengah masyarakat yang majemuk. Artinya, pendidikan, agama dan budaya harus dipahami secara benar, agar masyarakat mengalami kemajuan dan tidak terikat oleh sistem feodalisme. Dengan kata lain, pendidikan agama Kristen menjadi media dan sarana yang bisa menjembatani serta melakukan pendekatan humanis-sosial untuk meningkatkan mutu pendidikan yang universal bagi anak-anak serta masyarakat Suku Boti. Dengan demikian, pendidikan akan menciptakan ekosistem pembudayaan dan pemberdayaan individu menjadi lebih dewasa dalam berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melihat bahwa konsep pendidikan yang membebaskan dalam konteks kehidupan orang Brasil dan sistem feodal yang terjadi di Suku Boti sangat relevan, sehingga penulis ingin melihat sejauh mana relevansinya dengan menguji teori Paulo Freire dalam feodalisme Suku Boti untuk di implementasikan dalam pelaksanaan pendidikan agama Kristen dengan judul "*Feodalisme Budaya Suku Boti Menurut Perspektif Teori Paulo Freire Tentang Pendidikan Yang Membebaskan Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Agama Kristen*". Penelitian ini sangat urgen karena dapat memberi masukan bagi

masyarakat Suku Boti, sehingga mereka sadar bahwa pendidikan sangat dibutuhkan guna mencapai perubahan dalam segi pendidikan dan ekonomi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Budaya Suku Boti mengandung nilai-nilai feodalisme, sehingga masyarakat dalam hal ini anak-anak kurang berkembang dalam pendidikan dan tertinggal dalam berbagai aspek pendidikan di tengah persaingan global.
2. Masyarakat Suku Boti kurang menyadari pentingnya pendidikan karena pengaruh feodalisme, sehingga tingkat pendidikan masyarakat Suku Boti sangat rendah.
3. Perilaku feodalis dari sistem budaya Suku Boti memperkeruh citra masyarakat desa Boti secara umum yang terkenal dengan etika dan normanya.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah mengamati budaya Suku Boti khususnya menyangkut feodalisme pada masyarakat Suku Boti di Desa Boti, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kajian penulisan ini juga akan memfokuskan pada Pendidikan Agama Kristen. Penulisan ini melakukan pendekatan etnografi terhadap masyarakat Boti dan pihak-pihak terkait seperti Guru Pendidikan Agama Kristen, Kepala Sekolah, Kepala Desa, tokoh agama dan Raja Boti, tokoh adat serta dinas pendidikan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan serta mencari solusi untuk mengatasi masalah kurangnya pendidikan di Desa Boti.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana sistem feodalisme menguasai masyarakat Suku Boti di Desa Boti, Kabupaten Timor Tengah Selatan?
2. Bagaimana konsep dan urgensi Pendidikan Agama Kristen yang membebaskan masyarakat menurut teori Paulo Freire?
3. Bagaimana feodalisme budaya Suku Boti menurut perspektif teori Paulo Freire tentang pendidikan yang membebaskan dan implementasinya dalam pendidikan agama Kristen?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem feodalisme menguasai masyarakat Suku Boti di Desa Boti, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Untuk mengetahui konsep dan urgensi Pendidikan Agama Kristen yang membebaskan masyarakat menurut teori Paulo Freire.
3. Untuk mengetahui feodalisme budaya Suku Boti menurut perspektif teori Paulo Freire tentang pendidikan yang membebaskan dan implementasinya dalam pendidikan agama Kristen.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Universitas Kristen Indonesia

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih riset yang dilakukan untuk Universitas Kristen Indonesia, khususnya bagi Prodi Magister Pendidikan Agama

Kristen yang dapat digunakan dalam pembelajaran tentang pendidikan yang membebaskan menurut teori Paulo Freire, khususnya dalam mata kuliah Strategi Pendidikan Agama Kristen, dan Mata Kuliah Metode Penelitian. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian yang memiliki keterkaitan dengan kebudayaan.

2. Bagi pemerintah daerah dan Desa Boti

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran berupa upaya dan metode dalam menangani pendidikan yang terbelenggu oleh budaya kepada pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selain berkontribusi, penelitian ini dapat menjadi kritikan bagi masyarakat Suku Boti dan raja Boti karena lebih mengutamakan tradisi dan ritual dibandingkan dengan pendidikan bagi keberlangsungan kebebasan masyarakat di desa Boti secara khusus.

G. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang terdiri dari: Feodalisme, Budaya Suku Boti, Pendidikan Agama Kristen, Konsep Pendidikan Membebaskan Paulo Freire.

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, sumber data dan analisis data.

Bab IV berisi gambaran lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data dan hasil penelitian.

Bab V berisi kesimpulan dan saran.